



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

KERJA SAMA PERTAHANAN INDONESIA - KAZAKHSTAN

Aryojati Ardipandanto
Analisis Legislatif Ahli Muda
aryojati.ardipandanto@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI), Prabowo Subianto, menerima kunjungan Duta Besar Kazakhstan H.E. Mr Daniyar Sarakenov di Kementerian Pertahanan pada 13 Januari 2023. Dalam pertemuan ini dibahas upaya membangun kerja sama pertahanan kedua negara. Menhan Prabowo Subianto menjelaskan, dalam membangun kerja sama pertahanan, Indonesia berpedoman pada tiga pilar kebijakan, yaitu membangun rasa saling percaya, membangun kapasitas pertahanan, dan mendorong kemandirian industri pertahanan.

Dalam kerja sama pertahanan dengan Kazakhstan, Menhan Prabowo berharap dapat menjajaki berbagai potensi kerja sama, seperti pengembangan pendidikan militer, pengembangan teknologi pertahanan, dan peluang lain yang dapat dijajaki bersama. Dalam bidang industri pertahanan, Indonesia berharap dapat menjalin kerja sama melalui mekanisme alih teknologi. Diharapkan ke depan, Indonesia dan Kazakhstan dapat mengembangkan produksi bersama.

Letter of Intent antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Republik Kazakhstan tentang Kerja Sama Bilateral di Bidang Pertahanan telah ditandatangani secara sirkuler pada 29 Juni 2021 di Jakarta oleh Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia, M. Herindra dan pada 3 September 2021 di Nur Sultan oleh Wakil Menteri Pertahanan Republik Kazakhstan. Ruang lingkup kerja sama tersebut meliputi kunjungan pejabat tinggi dan pejabat tingkat operasional, promosi kerja sama pendidikan dan pelatihan, pertukaran pengalaman di bidang kegiatan pemeliharaan perdamaian, serta bidang kerja sama lain yang dapat disepakati bersama.

Selain kerja sama dalam bidang alutsista, sebenarnya hal yang dapat dipelajari dari Kazakhstan dalam mengembangkan kekuatan pertahanannya adalah pada aspek memberdayakan komponen cadangannya. Angkatan Bersenjata Republik Kazakhstan adalah angkatan bersenjata terpadu. Angkatan bersenjata ini terdiri dari pasukan darat, pasukan udara, pasukan angkatan laut, dan garda nasional. Adapun garda nasional merupakan bagian dari angkatan bersenjata yang diisi oleh komponen cadangan pertahanan negara Kazakhstan, yaitu masyarakat sipil. Dengan menyadari bahwa masyarakat merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari kekuatan pertahanan negara Kazakhstan, maka pemerintah Kazakhstan semakin serius untuk memberdayakan kekuatan komponen cadangan, yaitu masyarakat sipil, untuk mengoptimalkan pertahanan negara. Hal ini juga didukung oleh arah kebijakan luar negeri Kazakhstan yang memiliki tanggung jawab untuk mengedepankan stabilitas geopolitik dan keamanan regional.

Komponen cadangan Kazakhstan dibentuk untuk bersiap tanpa menunggu ancaman tiba di depan mata, apalagi saat ini ancaman *proxy* meluas ke berbagai negara di dunia. Kazakhstan mengupayakan dengan keras agar pertahanannya mampu bertahan dari segala bentuk ancaman. Untuk menghasilkan penyelenggaraan sistem pertahanan negara yang efektif dan efisien, maka komponen cadangan menjadi prioritas.

Atensi DPR

Dalam melakukan kerja sama pertahanan dengan Kazakhstan, Komisi I DPR RI perlu mengingatkan Menhan RI agar memerhatikan ketentuan dalam Pasal 43 ayat (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, yaitu bahwa pertama, alutsista yang diprioritaskan untuk diadakan di Indonesia nantinya haruslah yang belum atau tidak dapat dibuat di dalam negeri. Kedua, pengadaan alutsista harus mengikutsertakan partisipasi Industri Pertahanan di Indonesia. Ketiga, kerja sama pertahanan dengan Kazakhstan harus mengedepankan prinsip alih teknologi yang berkelanjutan. Keempat, harus ada imbal dagang kandungan lokal dan/atau *offset* paling rendah 85%. Kemudian, sesuai dengan ayat (8)nya, berdasarkan kebutuhan operasional, Pengguna (dalam hal ini khususnya TNI) dan Industri Pertahanan dapat bersama-sama merumuskan spesifikasi teknis alutsista yang dibutuhkan secara riil. Selanjutnya, Menhan RI juga harus didorong untuk mempelajari bagaimana Kazakhstan mengembangkan komponen cadangannya secara efektif selama ini.

Sumber

kemhan.go.id, 13 Januari 2023;

seskoad.mil.id, Maret 2022;

UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyantri
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023